

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tema penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan objek penelitian berupa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suruh pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kriteria evaluasi yang telah disusun serta mengetahui evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suruh. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan masukan dan rekomendasi bagi pihak yang memformulasikan kebijakan serta pelaku kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suruh. Merujuk pada sasaran sebelumnya, melakukan penilaian efektivitas terhadap kebijakan yang berlaku di Kecamatan Suruh kriteria tersebut berasal dari pendekatan aset dan pendekatan penghidupan berkelanjutan yang disusun menjadi kriteria evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suruh pada tahun 2020.

Kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Semarang tahun 2020. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama yang didapatkan adalah dari 9 (sembilan) objek kebijakan berupa program penanggulangan kemiskinan yang telah di analisis, tidak ada satupun program yang bisa sekaligus secara simultan memenuhi 9 (sembilan) kriteria evaluasi yang telah disusun berdasarkan kriteria pendekatan aset dan pendekatan penghidupan berkelanjutan. Meskipun demikian, sudah terdapat dua program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah memenuhi 8 (delapan) kriteria evaluasi. Oleh karenanya dua program tersebut menjadi program yang paling efektif untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suruh.

Kesimpulan kedua yang didapatkan adalah berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dengan indikator kemiskinan yang berlaku. Sebenarnya kebijakan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik untuk penanggulangan kemiskinan yang ada, tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 ini membuat kebijakan yang telah dilaksanakan berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena menunjukkan indikator kemiskinan yang masih

cukup tinggi. Indikator kemiskinan meliputi Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin mengalami kenaikan dari tahun 2020-2021.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk pemerintah selaku pembuat sekaligus pelaksana kebijakan penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Suruh. Berikut merupakan penjabaran dari rekomendasi tersebut.

1. Program yang bersifat bantuan sosial memang sangat dibutuhkan dalam kondisi pandemi seperti ini untuk meningkatkan aset masyarakat miskin, baik dari segi aspek pendidikan maupun kesehatan. Tetapi pemerintah perlu membuat aturan tambahan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dan tidak terlena dengan bantuan yang ada.
2. Program mengenai pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan untuk masyarakat terlepas dari kemiskinan dengan menggunakan kapasitas masyarakat itu sendiri, program mengenai pendidikan dan pelatihan ini sangat cocok untuk mendukung program bantuan sosial yang telah dilakukan sehingga masyarakat dapat mencari pekerjaan dan tidak terlena dengan bantuan yang ada.
3. Dalam penanggulangan Kemiskinan setelah pandemi covid-19 berakhir pemerintah perlu menyiapkan berbagai macam pelatihan atau membuka lapangan pekerjaan yang banyak sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan kembali setelah pandemi covid-19 berakhir.